

## **Pidato Tanwir**

# **DINAMIKA GERAKAN PENCERAHAN Refleksi Dua Tahun Pasca Muktamar Seabad, dan Proyeksi Tiga Tahun ke Depan**

Prof. Dr. M. Din Syamsuddin  
Ketua Umum PP Muhammadiyah

*Bismilahirrahmanirrahim*

Hampir dua tahun Muktamar Seabad Muhammadiyah di Yogyakarta 2010 berlalu. Hiruk pikuk kota Yogyakarta dan gebyar Muktamar masih terbayang di benak kita. Suasana permusyawaratan di Sportorium UMY masih terngiang-ngiang di ingatan kita. *Lan tarji'a al- ayyam al- laty madhat*, masa lalu tak kan kembali lagi. Kita hanya perlu melakukan muhasabah (introspeksi), muraqabah (retrospeksi), kemudian muwajahah (proyeksi) ke masa depan. Melalui ketiga pendekatan tadi kita mengurai perjalanan Persyarikatan dengan capaian, permasalahan, dan peluang yang menantang di hadapan, kemudian memantapkannya sebagai gerakan pencerahan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa.

### **Dinamika Relatif**

Secara relatif Muhammadiyah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal ini antara lain ditandai oleh penambahan jumlah amal usaha dalam

berbagai bidang, dan penambahan jumlah cabang dan ranting di berbagai daerah, termasuk cabang istimewa di luar negeri. Walaupun di sisi lain dapat pula dikatakan secara relatif mengalami kemunduran dan pengenduran terutama dari sudut etos gerakan, kualitas amal usaha, dan ketersediaan kader handal. Kenyataan itu semakin buram jika dikaitkan secara komparatif dengan dinamika eksternal, baik pada skala global maupun nasional .

Selama dua tahun terakhir, sesungguhnya Gerakan Pencerahan Muhammadiyah mengalami dinamika signifikan. Banyak cabang dan ranting hampir mati yang dapat dihidupkan, banyak cabang dan ranting baru dapat didirikan. Begitu pula, cukup banyak amal usaha baru diresmikan, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan dengan berdirinya sejumlah rumah sakit baru atau rumah sakit lama yang naik kelas, kendati terakhir terkendala oleh regulasi negara yang tidak memudahkan Muhammadiyah mendirikan rumah sakit baru. Begitu pula dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Gerakan Pencerahan Muhammadiyah dapat merambah kalangan masyarakat marjinal seperti petani, nelayan, dan buruh, melalui pendampingan dan penerapan pendekatan organik, yang dikendalikan dai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Terpadu di beberapa daerah. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi, juga sudah banyak berdiri lembaga keuangan

mikro (*Baitut Tamwil Muhammadiyah/ BTM*) dan gerai-gerai retail yang diberi nama Sang Surya Mart, Swalayan Sang Surya, dan lain sebagainya. Muhammadiyah juga cukup berperan dalam setiap penanggulangan bencana melalui Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC yang berusaha pada kesempatan pertama mengirim relawan tanggap darurat.

Pada bidang-bidang lain yang menjadi inti kegiatan (*core activity*) Muhammadiyah sebelumnya, seperti pendidikan, dan pelayanan sosial, juga menunjukkan perkembangan. Walau secara kuantitatif jumlah amal usaha di bidang-bidang ini kurang bertambah, namun orientasi ke arah kualitas sudah mulai dilakukan. Muncul sekolah-sekolah alternatif, kreatif, dan inovatif. Semangat wilayah/daerah untuk mendirikan perguruan tinggi sangat tinggi. Hampir di seluruh wilayah Muhammadiyah sudah berdiri PTM, termasuk di provinsi minoritas Muslim UM/PTM bisa berdiri tegak dengan banyak mahasiswa non-Muslim. Ide inovatif untuk mendirikan bentuk lembaga pendidikan alternatif, seperti Community College, sudah mulai dirintis. Begitu pula, sudah mulai ada nuansa tajdid pada penyelenggaraan panti-panti sosial, seperti adanya pesantren panti, atau panti-panti asuhan yang berorientasi pada pengkaderan, atau bentuk-bentuk baru seperti panti bayi sehat, panti lansia, panti untuk korban napza, walau jumlahnya masih berbilang jari.

Pada bidang pemikiran Islam dan tabligh, yang menjadi ciri utama sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah dapat mempertahankan citra diri sebagai gerakan pembaruan dengan dimulainya proyek besar penyusunan Tafsir at- Tanwir, sampai kepada upaya pengembangan pemikiran antisipatif terhadap modernisasi kawasan Asia Timur. Tabligh Muhammadiyah masih dapat berjalan lancar melalui pengajian-pengajian rutin, termasuk pengajian Ahad pagi dan Hari Bermuhammadiyah, di berbagai daerah walau belum merata. Juga, dakwah khusus mampu melakukan penetrasi ke dalam wilayah tantangan di berbagai daerah walaupun belum massif.

Mengikuti trend era informasi Muhammadiyah sudah dapat mengembangkan sistem informasi melalui website dan radio streaming, kendati volumenya terbatas. Perhatian Muhammadiyah terhadap isu-isu global seperti lingkungan hidup dan HAM mulai berkembang melalui prakarsa gerakan sedekah sampah, penghijauan lingkungan sekitar.

Sebuah terobosan baru tengah digerakkan, yaitu penegakan kedaulatan negara dalam bidang ekonomi, melalui *judicial review* terhadap UU Migas yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. “Jihad Konstitusi” yang merupakan amanat Tanwir Lampung 2009 dan

Muktamar 2010 ini dapat dipandang sebagai amar makruf nahyi munkar yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena kalau berhasil akan membawa perubahan fundamental.

Masih banyak kemajuan relatif yang dapat dicapai Muhammadiyah dalam dua tahun terakhir ini, sebagaimana sudah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya, seperti dalam sertifikasi asset organisasi yang mulai merangkak naik, pengembangan seni-budaya dan olah raga yang mulai menggeliat.

Kegiatan kaderisasi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang menjadi prasyarat keberlangsungan gerakan cukup intensif walau belum, baik di pusat maupun di daerah, dan di lingkungan amal usaha, walau belum regular. Upaya peneguhan identitas dan kepribadian Muhammadiyah menjadi perhatian serius sejak beberapa tahun terakhir. Pembinaan keluarga, anak dan remaja berlangsung dinamis dan linear melalui Ortom Khusus, Aisyiah, baik melalui pengembangan Keluarga Sakinah maupun Qaryah Thayyibah.

### **Belum Sistemik dan Substantif**

Gejala dan nuansa dinamika di atas belum merupakan gerakan sistemik dan substantif. Proses yang terjadi masih bersifat sporadik, tidak konstan,

dan belum merata. Sebagai gerakan Muhammadiyah seyogyanya bergerak dalam nafas dinamika dan sistematika, yaitu proses dinamis dan sistematis dalam mencapai tujuan. Orientasi segenap elemen gerakan dalam berbagai tingkatan belum sepenuhnya secara berdisiplin mengacu kepada visi tak berjangka waktu (tujuan Muhammadiyah), maupun visi pengembangan yang telah ditetapkan untuk periode kepemimpinan Muktamar ke- 46 (Visi 2015). Upaya untuk berdisiplin mengacu kepada visi tersebut sudah dapat dilakukan pada tataran perencanaan program, seperti perumusan program-program permusyawaratan di bawah muktamar, dan penetapan rencana strategis maupun operasional (renstra/renop) bagi unit pembantu pimpinan (majelis/lembaga).

Namun, harus diakui bahwa konsistensi pelaksanaan program-program itu dalam kedisiplinan waktu, dan orientasi kepada target dan sasaran belum menggembirakan. Masih banyak program dan kegiatan yang belum terlaksana melewati tenggat waktu, dan banyak yang terlaksana kurang mencapai target dan sasaran. Orientasi pelaksanaan program dalam koordinasi dan kemitraan (*collaborative works*) di antara beberapa majelis dan lembaga belum terjadi maksimal. Begitu pula, pelaksanaan program dengan orientasi kualitatif (pembobotan) masih belum merata baik pada skala tataran maupun dataran. Sudah banyak wilayah/daerah yang beranjak dari orientasi kuantitatif ke kualitatif, tetapi tidak sedikit

yang masih menghadapi masalah dalam hal kuantitas kegiatan. Begitu pula, banyak majelis/lembaga yang dinamis, tetapi masih ada juga yang dapat dikatakan pasif dan statis.

Sebenarnya gerakan pencerahan Muhammadiyah banyak diakui cukup dinamis, dan dalam lintasan zaman masih dapat menunjukkan kemajuan. Muhammadiyah bahkan diakui sebagai *the largest modernist Islamic organization* (organisasi Islam modern terbesar) di Indonesia dan tentu di dunia, dilihat dari sudut jumlah lembaga atau amal usaha yang semuanya milik organisasi. Muhammadiyah juga diakui sebagai organisasi Islam yang paling rapih dan berbasis pada sistem (*based on system*). Juga Muhammadiyah dianggap sebagai organisasi yang kaya dengan asset. Tetapi itu mungkin benar jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain, baik Islam maupun non Islam, yang tidak maju. Jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang maju di Dalam Negeri apalagi di Luar Negeri, baik di luar lingkungan umat Islam maupun di kalangan umat Islam, maka sesungguhnya organisasi yang kita cintai ini secara komparatif tertinggal.

### **Beberapa Kendala**

Kenyataan tadi dipengaruhi banyak faktor atau kendala. Pertama, kendala sumber daya nilai, yaitu melemahnya etos gerakan. Etos gerakan

Muhammadiyah yang melatari kelahirannya seabad yang lalu, yaitu etos *al-maun* (melayani dan memberi yang berguna) dan *fastabiqul khairat* (bersaing untuk keunggulan), dan *al-ghirah 'ala al-din* (bersemangat tinggi menegakkan agama) meluntur dan mengendur di kalangan pegiat gerakan. Walaupun etos-etos ini masih terpelihara, namun aktualisasinya tidak lagi sedahsyat pada dasawarsa-dasawarsa awal Muhammadiyah. Kecenderungan meminta dan dilayani sudah mulai menggejala, begitu pula semangat dan daya juang untuk menciptakan kemajuan dan keunggulan sudah mulai berkurang.

Kedua, kendala sumber daya material. Melemahnya sumber daya ini diakibatkan oleh berkurangnya jumlah pengusaha atau wiraswastawan yang dimiliki atau berafiliasi dengan Muhammadiyah. Sebagai akibat runtuhnya ekonomi umat Islam dan robohnya “kedai kaum santri” sejak masa Orde Baru, Muhammadiyah mengalami defisit logistik yang berarti. Pembangunan ekonomi kapitalistik yang kurang memberi peluang kepada kaum santri telah membawa dampak sistemik terhadap perekonomian umat Islam. Bersamaan dengan itu, pergeseran basis dukungan terhadap Muhammadiyah, dari sebelumnya banyak kaum saudagar ke bukan-saudagar, ikut mempengaruhi kekuatan sumber daya material organisasi. Keadaan ini, pada dasawarsa terakhir, diperparah oleh kecenderungan tabligh Muhammadiyah “kurang laku” dan “kurang penetratif” di

kalangan kelas menengah Muslim (eksekutif, pengusaha, dan professional), yang dulu merupakan andalan utama bagi menggerakkan amal usaha Muhammadiyah. Kelemahan sumber daya material ini pada tingkat tertentu mengubah budaya Muhammadiyah dari memberi dan melayani menjadi meminta dan dilayani.

Ketiga, kendala sumber daya manusia. Proses dekadensi atau pelemahan juga terjadi pada sumber daya manusia. Pelemahan ini ditandai oleh melemahnya kuantitas dan kualitas kader, yang berakibat pada melemahnya kualitas tenaga pimpinan pada banyak lini, baik organisasi maupun amal usaha. Keadaan ini dapat disebabkan oleh kurang berfungsi efektifnya lembaga-lembaga perkaderan (seperti Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan pada masa lampau) ataupun lembaga-lembaga pendidikan, dan organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah, yang sejatinya adalah sarana pengkaderan.

Keempat, kendala dinamika luaran. Kendala ini, berupa perkembangan di luar Muhammadiyah baik nasional maupun global. Modernisasi Indonesia sejak awal masa Orde Baru dan kemudian pada era reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Terjadi perubahan struktur sosial, pusat penguasaan ekonomi dan politik. Muncul banyak kelompok masyarakat baru, yang masing-masing

berupaya untuk berperan di pentas nasional. Depolitisasi masyarakat dan depolitisasi Islam waktu itu berandil dalam melemahkan peran umat Islam. Era reformasi yang memberi kebebasan, selain membawa manfaat juga mendatangkan mudarat. Arus liberalisasi politik, ekonomi, dan budaya membawa dampak sistemik terhadap kehidupan bangsa. Bahkan, reformasi politik, termasuk di dalamnya amandemen konstitusi dan turunannya pada berbagai undang-undang, berpengaruh pada gerak organisasi-organisasi masyarakat termasuk Muhammadiyah. Kondisi nasional ini dipengaruhi oleh perkembangan global. Arus globalisasi dan dinamika kawasan Asia Timur ikut mempengaruhi kondisi domestik Indonesia. Aneka krisis dunia, baik krisis energy, krisis pangan, krisis lingkungan, dan krisis ekonomi/keuangan tentu membawa dampak juga ke dalam negeri. Perkembangan nasional dan global tadi berdimensi ganda: membawa hal positif dan hal negatif sekaligus. Kendala yang dihadapi Muhammadiyah adalah ketidakmudahan Muhammadiyah dalam menjalankan misi sucinya sebagai gerakan pencerahan. Terhadap hal positif Muhammadiyah tidak mudah memenangkan persaingan, dan terhadap hal negatif Muhammadiyah tidak mudah menanggulangi kerusakan.

Beberapa kendala di atas membuat efektifitas gerakan pencerahan Muhammadiyah berkurang. Muhammadiyah tidak lagi sepenuhnya tampil

sebagai “penyelesai masalah” (*problem solver*) bangsa, tapi pada sisi tertentu menjadi “bagian dari masalah (*part of the problem*).

### **Indonesia Yang Berubah**

Suatu hal yang perlu disadari adalah bahwa Indonesia, di mana Muhammadiyah berada dan berjuang, adalah Indonesia baru, bukan Indonesia dahulu, tapi Indonesia yang telah berubah. Perubahan struktur sosial-ekonomi-politik yang telah terjadi pada era Orde Baru, minus otoritarianisme politik dan sentralisme kekuasaan, masih berlangsung pada era reformasi. Pada era reformasi kehidupan nasional ditandai oleh semakin derasnya arus liberalisasi politik, ekonomi, dan budaya.

Pengamalan ajaran-ajaran demokrasi pada tingkatnya yang “paling liberal” mendorong demokratisasi Indonesia bersifat sangat liberal. Selain pembentukan sejumlah lembaga quasi konstitusional seperti komisi atau komite yang mengurangi peran, demokratisasi juga ditandai oleh pemilihan langsung eksekutif pada hampir semua tingkatan (presiden/wakil presiden hingga ke bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota). Hal pertama berdampak pada ketidakhadiran negara, dan kurang bertanggung jawabnya negara atas berbagai masalah dewasa ini, yang bermuara pada penumpukan masalah nasional. Hal kedua mendorong politik harga tinggi (*high cost politics*) dengan segala

konsekwensinya dalam kehidupan masyarakat. Proses pemilihan langsung juga mempengaruhi integrasi dan soliditas masyarakat, tidak hanya di ranah politik tapi juga di ranah sosial. Konflik internal organisasi tak terelakkan, dan energi terkuras untuk menanggulangi dampak ini.

Liberalisasi ekonomi yang telah mengakibatkan munculnya “keuangan yang maha kuasa’ (*the power of money*) kini memasuki wilayah politik dengan menyuburkan praktek politik uang (*money politics*), yang kemudian juga merambah wilayah sosial termasuk organisasi keagamaan. Maka terjadilah demoralisasi serius dalam kehidupan organisasi kala banyak anggota dan bahkan pimpinan dengan mudah menggadaikan diri untuk kepentingan politik partisan, dan organisasi menjadi subordinat partai politik tertentu.

Sistem perpolitikan dan kepartaian Indonesia juga menetapkan partai politik sebagai “jalur tunggal” mobilitas vertikal warga negara. Sebagai akibatnya, ormas kehilangan akses dalam arena pengambilan keputusan strategis, baik legislatif maupun eksekutif. Maka berlakulah adagium, “lembu punya susu sapi punya nama”, yang analog dengan “ormas punya anggota tapi partai politik yang menikmatinya”.

Liberalisasi ekonomi yang terjadi dewasa ini, yaitu dengan pembukaan pintu selebar-lebarnya bagi kapitalisme global, telah berandil besar bagi keruntuhan ekonomi kaum santri. *Multi National Corporation* yang beroperasi dengan modal besar dan kemampuan tinggi dengan mudah menguasai ekonomi nasional. Dominasi asing berada di atas 50% dalam bidang-bidang strategis, yaitu energi, telekomunikasi, dan perbankan. Bahkan, dalam bidang minyak dan gas, yang sangat vital bagi hajat rakyat, pihak asing menguasai hampir 80%. Kenyataan ini tentu berdampak pada perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan rakyat.

Tapi yang jelas dampaknya terasa pada kekuatan ekonomi umat Islam yang lebih banyak berada pada tingkat menengah, kecil, dan mikro. Ketidakmampuan pengusaha Muslim untuk bersaing, antara lain akibat kekurangan modal dan jaringan nasional dan internasional, telah menciptakan kekuatan ekonomi umat Islam terpuruk, dan pada giliran berikutnya membawa pengaruh terhadap kegiatan dakwah Islamiyah.

Liberalisasi budaya tidak kalah gentingnya. Arus penetrasi budaya luar yang tak terelakkan pada era globalisasi dewasa ini telah mengakibatkan melunturnya kepribadian bangsa. Hal ini ditunjukkan pada kegandrungan sebagian rakyat termasuk generasi muda terhadap semua yang berbau asing. Sementara pada sisi lain, kemampuan bangsa bersaing di pentas

antar bangsa secara umum tidak cukup tinggi, maka sindrom hilangnya kepercayaan diri bangsa menjadi luas.

Semua perkembangan tadi tentu membawa akibat dan dampak sistemik ke dalam kehidupan bangsa yang mayoritas beragama Islam. Terjadi proses dekadensi kehidupan nasional secara signifikan. Menurut kriteria PBB Indonesia sudah berada di ambang negara gagal (*failed state*). Hal ini dilihat dari 12 variabel negara gagal, enam sudah dimiliki Indonesia, antara lain distribusi kekayaan negara yang tidak merata, merajelalanya korupsi, dan penguasaan negara oleh segelintir elit. Pada tataran kedaulatan negara, khususnya dalam bidang ekonomi, juga dapat dikatakan runtuh, dengan adanya dominasi asing dalam bidang-bidang strategis tadi. Keadaan ini diperparah oleh faktor regulasi, baik pada UUD maupun UU, yang ternyata kurang berkorelasi positif terhadap pencapaian cita-cita nasional, bahkan berandil dalam meruntuhkan kedaulatan negara dalam bidang pangan dan ekonomi, seperti pada UU tentang Migas, UU tentang Minerba, UU tentang Investasi, dan UU tentang Geotermal.

Pada dataran budaya terjadi pula pengerusan watak bangsa, seperti ditunjukkan oleh rendahnya indeks pengembangan sumber daya manusia, dan derajat daya saing bangsa. Proses pendidikan nasional belum berhasil

membentuk watak bangsa yang kuat. Keluarga juga belum mampu memerankan fungsi edukatifnya secara maksimal.

Modernisasi telah membawa Indonesia ke tahap industrialisasi dan sekularisasi signifikan. Bahkan pada kalangan masyarakat tertentu, tahap masyarakat informasi sudah dimulai. Penggunaan teknologi informatika, seperti handphone, dan aneka produk internet seperti facebook atau twitter, yang masif, sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pengguna terbesar di dunia, tentu membawa akibat tersendiri, baik positif maupun negatif. Menghadapi itu semua, bangsa dan negara ternyata tidak siap dengan baik “mekanisme pertahanan diri” (*self defence mechanism*) maupun strategi kebudayaan (*strategy of culture*).

Berbagai upaya memang telah dilakukan, tetapi bersifat tambal sulam, tidak komprehensif dan strategis. Reformasi struktural pada kehidupan nasional melalui produk hukum dan perundang-undangan, serta kebijakan strategis oleh pemerintah dan DPR tidak membawa perbaikan signifikan, bahkan pada tingkat tertentu berandil dalam menciptakan “kerusakan nasional”. Partai-partai politik belum sepenuhnya menampilkan peran positif konstruktif bagi pembangunan bangsa. Banyak produk legislative yang justru mengandung masalah.

Upaya masyarakat madani untuk pemecahan masalah juga terlilit masalah. Selain karena kapasitas organisasi-organisasi masyarakat madani tidak seluruhnya memadai, juga derajat independensi dan otonomi sebagian mereka relative rendah. Celakanya, ketika lingkaran “bagian dari masalah ini” berkoalisi dengan lingkaran politik yang juga merupakan “bagian dari masalah”, maka hasilnya adalah munculnya masalah bangsa yang bersifat problematik.

Sebagai kekuatan bangsa yang bersaham besar dalam pembentukan negara, Muhammadiyah harus merasa ikut bertanggung jawab akan masa depan bangsa. Muhammadiyah harus mampu menampilkan diri sebagai faktor determinan, kalau tidak faktor efektif bangsa untuk masa depan. Muhammadiyah memiliki potensi besar, pengalaman sejarah yang panjang, dan modal sosial berupa budaya organisasi yang handal untuk memberi solusi. Persoalannya adalah Muhammadiyah tengah menghadapi masalah besar dalam dirinya, yaitu problema aktualisasi diri (*problem of self actualization*), atau ketidakmampuan menjelmakan potensi besar yang dimilikinya dalam konteks dinamika zaman.

### **Langkah Strategis ke Depan**

Menghadapi masa depan yang penuh tantangan di tengah Indonesia yang tengah berubah, dan dengan mengukur kapasitas diri yang masih ada,

Muhammadiyah dapat dan perlu melakukan langkah-langkah strategis. Sebenarnya, apa yang perlu dilakukan sudah terumuskan dalam Program Persyarikatan, baik yang berjangka panjang maupun berjangka pendek. Bahkan, program-program itu sudah dijabarkan ke dalam rencana kegiatan baik yang bersifat strategis maupun operasional. Yang tersisa adalah bagaimana menyatakan apa yang sudah dikatakan. Hal ini berhubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (POAC = Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) yang tepat, terarah, berdaya hasil dan berdaya guna; serta penerapan corak kepemimpinan yang berwawasan, berkemajuan, hadir, dan menggerakkan. Di antara langkah-langkah strategis itu adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi nilai-nilai keutamaan berupa ideologi dan khittah Muhammadiyah sebagai: Gerakan Islam Yang Berkemajuan (*Harakatud Dakwah ilal Khair*)), Gerakan Jalan Tengah (*Harakatul Wasathiyah/ Ummatan Washthan*), Gerakan Amal Usaha (*Harakatul 'Amal*), dan Gerakan Pencerahan (*Harakatut Tanwir*), selain sebagai Gerakan Amar Makruf Nahyi Munkar (*Harakatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar*). Revitalisasi ideologi dan khittah ini perlu menjadi gerakan sendiri melalui intensifikasi dan masifikasi kegiatan peneguhan dan penajaman di semua tataran dan dataran Persyarikatan.

2. Reposisi Muhammadiyah di tengah arus perubahan lokal, nasional, dan global, dengan memantapkan diri pada posisi sebagai: pelopor perubahan, pengawal keutuhan bangsa, pengayom kemajemukan, mesin penggerak kemajuan umat. Muhammadiyah pada setiap tingkatan kepemimpinan perlu mengambil prakarsa pemecahan masalah bangsa, dengan mengajak dan menggalang seluruh kekuatan bangsa.
3. Reinvensi karya-karya pencerahan kreatif dan inovatif, melalui peningkatan kuantitas dan kualitas gerakan dalam berbagai bidang. Dalam tiga tahun ke depan setiap jajaran Persyarikatan perlu bertekad mengembangkan model-model unggul dalam pelayanan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi.
4. Revitalisasi tabligh Muhammadiyah, terutama terhadap kelompok-kelompok pinggiran (*dhu'afa dan mustadh'afin*), dan kelas menengah, dengan menyesuaikan materi dan metode tabligh bagi kelompok-kelompok sasaran tersebut. Perluasan lingkaran pengajian dan radius silaturahmi muballigh merupakan jalan strategis untuk keberhasilan langkah ini.
5. Afirmasi Muhammadiyah sebagai gerakan kebudayaan/kultural, yang menjadikan penguatan landasan budaya masyarakat sebagai pusat gerakan, perlu dinyatalaksanakan. Peneguhan dan

penajaman khittah politik kebangsaan sangat mendesak. Pemantapan sikap dan pandangan Muhammadiyah terhadap Negara Pancasila sebagai “Darul ‘Ahdi/ Negara Perjanjian atau Kesepakatan, dan “Darus Syahadah”/ Negara Kesaksian atau Pembuktian, yaitu sebagai ajang kompetisi sehat, perlu mengkristal. Maka, hubungan Muhammadiyah dengan Negara adalah bersifat partisipatif, loyal, dan kritis. Dalam kaitan ini, khittah Muhammadiyah yang tidak memiliki hubungan organisatoris dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun harus diamalkan secara murni dan konsekwen. Pada setiap Pemilu, baik legislatif maupun eksekutif, Muhammadiyah secara institusional tidak boleh terlibat mendukung atau tidak mendukung seseorang calon. Warga Muhammadiyah harus menggunakan hati nurani dan kecerdasan untuk memilih atau tidak memilih seseorang calon dari partai manapun, dengan menghindari secara mutlak penghimpitan Muhammadiyah dengan partai politik tertentu manapun.

6. Realisasi semua langkah strategis di atas hanya akan dapat terlaksana dengan baik jika dipenuhi dua prasyarat utama: 1. Pembentukan fungsi-fungsi manajemen profesional dengan kepemimpinan yang efektif, dan 2. Adanya kekompakan dan kebersamaan di kalangan seluruh pemangku amanat dalam

Persyarikatan dengan semangat kolektif-kolejial, yakni mengedepankan musyawarah dan masing-masing menunaikan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

Dua tahun telah berlalu, tiga tahun masih tersisa bagi kita untuk mengemban amanat mulia jamaah Muhammadiyah pada periode ini. Harus menjadi tekad kita bersama, yang akan datang lebih baik dari pada yang telah pergi (*walal akhiratu khairun laka minal ula*).